

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada majalah mingguan Tempo yang rilis 19 agustus 1972, paragraf pertama salah satu berita berjudul “Akhirnya Ejaan Cocok” memuat sebuah anekdot berupa: “Seorang anak muda berseru kepada temanja pada suatu sore: ‘Ajo kita jalan-jalan mengkari tjoba-tjoba sambil mengisap mastjot dan mendengarkan Emilia Tjontessa’. Ini anak muda bisa membuat berang para ahli bahasa yang bersibuk dijalan Diponegoro 82. Tapi kalau lelutjon matjam begituan akan ditanggapi dengan berang, maka bisa djadi bahwa sebelum pemakaian Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dipakai dengan merata, para ahli bahasa sudah pada djadi penderita penyakit tekanan darah tinggi” (Tempo, 1972).¹ Paragraf pertama ini menyiratkan bagaimana kemungkinan respon pemerintah terhadap penggunaan ejaan yang salah. Berita tersebut menjadi sajian pembuka dari Tempo merujuk pidato nasional Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1972 sekaligus peresmian penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Peristiwa tersebut merupakan awal dari momen perubahan sejarah Indonesia (*Discontinuity*) di mana kekuasaan otoriter mulai memasuki ranah linguistik masyarakat indonesia.

Penelitian komunikasi positivis pada umumnya mendefenisikan bahasa sebagai alat penyampaian pesan yang objektif dan terstandarisasi dengan baik. Namun, pandangan ini akhirnya memperhalus sisi lain bahasa yang dapat

¹ Seorang anak muda berseru kepada temannya pada suatu sore: 'Ayo kita jalan-jalan mencari coba-coba sambil mengisap maskot dan mendengarkan Emilia Contessa'. Anak muda ini bisa membuat marah para ahli bahasa yang bersibuk di Jalan Diponegoro 82. Tapi kalau lelucon macam begituan akan ditanggapi dengan marah, maka bisa jadi bahwa sebelum pemakaian Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dipakai dengan merata, para ahli bahasa sudah jadi penderita penyakit tekanan darah tinggi” (Tempo, 19 agustus 1972)

digunakan sebagai alat kekuasaan pada ruang sosiopolitik yang tidak netral dan subjektif. Ketika bahasa mengalami standarisasi oleh kekuasaan untuk menentukan penggunaan yang dianggap sah dan benar, pada dasarnya bahasa sudah mengalami pembaruan rezim kebenaran (*regime of truth*) (Foucault 1980). Standarisasi bahasa kemudian akan melahirkan strata baru di masyarakat, individu yang mampu menggunakan bahasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh penguasa dianggap sebagai seorang terpelajar, modern, dan tertib. Sebaliknya, individu yang memilih penggunaan bahasa yang berbeda ataupun gagal menerapkannya akan dianggap sebagai seorang yang gagal, tidak terdidik, tidak normal, dan cacat logika (Heryanto 1995).

Standarisasi bahasa pernah diterapkan di Indonesia pada era orde baru yang dipimpin seorang mantan militer sebagai Presiden yaitu Soeharto (1966-1998). Sebagai mantan petinggi militer, gaya militeristik dan otoritarian diadopsi oleh Soeharto menjadi karakter kepemimpinannya, obsesi terhadap ketertiban, kedisiplinan, dan narasi “lebih baik dari sebelumnya” menjadi ciri khas Soeharto dalam memimpin. Obsesi Soeharto dalam hal perbaikan terbukti melalui bagaimana rezim era tersebut diberikan label “orde baru” yang di kenalkan oleh Soeharto sendiri. Istilah orde baru menjadi *branding* Soeharto yang bermaknakan masa kepemimpinannya akan menjadi pembaruan dan awal kemajuan Indonesia. Soeharto juga melabelisasi era sebelumnya, yakni Presiden Sukarno dengan sebutan Orde lama. Pelabelan era sebelumnya sebagai orde lama dimaksudkan Soeharto untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa era tersebut merupakan orde kekalahan, kesalahan, dan kegagalan yang kusut (Latifah et al. 2025)

Ketertiban dan keseragaman (*uniformity*) digunakan rezim orde baru

sebagai alat komunikasi politik melalui narasi besar pembangunan. Demi mewujudkan ambisi pembangunan, Soeharto dan rezimnya menerapkan ketertiban dan keseragaman tersebut secara langsung dalam kebijakan publik yang kemudian melahirkan sistem kepemimpinan *top-down* selama orde baru berkuasa (Heryanto 1995). Gaya kekuasaan militeristik, otoritarian, dan ambisi keseragaman orde baru memasuki ranah linguistik masyarakat melalui kebijakan penetapan Ejaan Yang Disempurnakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 57 Tahun 1972. Tidak cukup pada penetapan aturan resmi melalui keputusan secara hukum dalam Keppres, Soeharto kemudian mendeklarasikan peresmian Ejaan Yang Disempurnakan melalui pidato nasional Presiden pada 16 Agustus 1972 (Samuel 2008) Penetapan Keppres dan deklarasi ini menjadi fakta genealogis dimana seorang pemimpin tertinggi negara sekaligus jenderal militer turun tangan mengurus tanda baca dan pergantian huruf.

Genealogi didefinisikan sebagai rentetan konflik, pecahan, aturan yang menyebabkan lahirnya sejarah masa kini (Foucault 1977). Pada penelitian ini, peneliti melihat Ejaan Yang Disempurnakan dianggap normal dan aturan mendasar dalam seluruh penulisan di Indonesia memiliki proses pendisiplinan, penyereagaman, serta pengubahan (*discontinuity*) pada masa penciptaannya. Dalam bukunya (*Nietzsche, genealogy, history*, 1977) Foucault menjelaskan bahwa genealogi itu abu-abu, sehingga Genealogi tidak harus muncul akibat sesuatu konflik yang terjadi saat ini, namun bisa datang dari sesuatu yang sudah dianggap normal di masyarakat. Memperkenalkan kembali sejarah konflik dari suatu hal yang normal saat ini kepada masyarakat menjadi inti dari Genealogi.

Penelitian ini akan berfokus membedah bagaimana Ejaan Yang

Disempurnakan perlahan menjadi hal normal (Genealogi) di tengah masyarakat melalui pemberitaan majalah Tempo. Pada penelitian relevan, peneliti menggunakan riset oleh Latifah et al yang membedah bagaimana orde baru melanggengkan kekuasaan menggunakan gaya bahasa dan wacana pada teks Supersemar, riset tersebut menggunakan analisis wacana Ruth Wodak untuk melihat labelisasi yang dibuat oleh rezim orde baru. Peneliti melihat riset komunikasi dan wacana mengenai era Orde baru selama ini umumnya hanya menguliti konflik politik keras (*hard news*) yang terjadi pada masa tersebut, namun masih jarang penelitian yang mencoba membedah bagaimana rezim otoriter orde baru sebenarnya juga menggunakan cara halus dan senyap untuk mempertahankan kekuasaan (*soft power*), seperti pendisiplinan bahasa melalui Ejaan Yang Disempurnakan.

Penelitian ini menetapkan periodisasi data dari tahun 1972 hingga 1988. Pembatasan waktu ini berdasarkan aspek genealogis historis, tahun 1972 merupakan momen atau titik awal EYD masuk ke dalam ruang publik, memicu goncangan, ketidakpastian, dan penolakan dari berbagai aktor komunikator massa. Tahun 1988 merupakan tahun diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia V, peristiwa monumental yang melahirkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Pertama dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Tahun 1988 adalah titik jenuh genealogi penciptaan Ejaan Yang Disempurnakan, karena pada tahun tersebut EYD berhasil melewati fase sosialisasi dan masuk ke dalam tahap naturalisasi total, kekuasaan telah sukses bekerja dan membuat masyarakat menganggap EYD sebagai aturan teknis yang alamiah, netral, dan tidak lagi dicurigai sebagai produk rekayasa politik Orde Baru (Kridalaksana 1991). Rentang waktu 16 tahun ini

menyediakan data untuk melacak bagaimana wacana bahasa bertransformasi dari masa penolakan menuju kedisiplinan bahasa.

Sebagai sumber data utama penelitian, Majalah Tempo yang berdiri pada tahun 1971 dipilih karena memegang posisi unik dan dilematis dalam ekosistem komunikasi pers Orde Baru. Di satu sisi, Tempo dikenal sebagai majalah berita mingguan yang mengusung gaya bahasa jurnanisme naratif yang cair, segar, intelektual, dan fleksibel. Di sisi lain, Tempo dan orde baru merupakan dua hal yang memiliki kenangan membekas bagi masing-masing pihak. Majalah Tempo mengalami 2 kali pelarangan penerbitan berita pada tahun 1982 akibat kritik keras Tempo terhadap pemilu tahun tersebut, dan 1994 ketika Tempo mengeluarkan laporan kontroversial pembelian kapal perang bekas dari Jerman oleh B.J Habibie (Manzella 2007).

Peneliti menggunakan lima berita dari majalah Tempo secara spesifik yang membahas tentang Ejaan Yang Disempurnakan. Pertama, berita berjudul “Akhirnya Ejaan Cocok” yang rilis pada 19 Agustus 1972 yang sudah peneliti singgung pada awal latar belakang. Berita yang terbit tepat pada minggu awal peluncuran EYD ini menggambarkan resistensi awal di tingkat akar rumput, mulai dari ejekan para remaja, frustrasi para ahli bahasa, hingga keluhan nyata para pengusaha penerbitan buku yang merugi akibat keterbatasan matriks huruf "Y" yang mendadak harus dicetak massal akibat aturan EYD yang menggunakan huruf tersebut secara masif, serta kecemasan industri lokal akan kalah bersaing dengan kualitas cetak Malaysia akibat proyek unifikasi bahasa Melayu Indonesia ini. Kedua, berita berjudul “Salah Tulis dalam Koran” rilis pada 24 Juli 1982. Arsip ini memperlihatkan bekerjanya apparatus pengawasan (Panopticon) bahasa negara. Berita ini melaporkan proyek

audit bahasa yang dibiayai oleh Departemen P dan K kepada akademisi IKIP Yogyakarta untuk mengklasifikasikan 31 jenis kesalahan ejaan di koran koran nasional seperti Kompas dan Suara Karya. Berita ini membuktikan bahwa pers berada di bawah tatapan pengawasan yang konstan, memaksa jurnalis melakukan *self censorship* agar bahasanya selalu dinilai patuh oleh negara. Berita berikutnya berjudul “Mengurai Bahasa yang Kusut” pada 5 November 1988. Terbit di era puncak pelebagaan bahasa (Kongres bahasa V), berita ini memperlihatkan keberhasilan hegemoni negara melalui pelabelan. Keempat berita berjudul “Setelah Kongres Bahasa Apa” dan kelima berjudul “Tanda Baca Kalimat Pidato” memperlihatkan bagaimana wacana bahasa telah sepenuhnya dijinakkan menjadi komunikasi teknokrasi.

Peneliti menggunakan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) Model Tiga Dimensi Norman Fairclough yang dipayungi secara makro oleh perspektif Genealogi Michel Foucault. Melalui dimensi Analisis Teks (mikro), peneliti akan menguliti pilihan diksi, metafora seperti kata kusut atau cocok, dan gaya pelaporan untuk membongkar ideologi tersembunyi. Melalui dimensi Discourse Practice (meso), bagaimana Tempo sebagai produsen wacana terpengaruh oleh keadaan pada saat proses produksi berita, juga melihat bagaimana konsumen berita tersebut memberikan tanggapan. Terakhir, melalui dimensi Socio cultural Practice (makro), teks berita dikoneksikan dengan hasrat penyeragaman rezim Orde Baru.

Analisis Fairclough tersebut kemudian dibedah secara teoritis menggunakan Genealogi Foucault. Genealogi diaplikasikan bukan untuk mencari kebenaran asal-usul ejaan, melainkan sebagai sebuah sejarah masa kini (*history of the present*) untuk membongkar bahwa EYD yang kita anggap wajar, netral, dan

baik hari ini sesungguhnya merupakan produk akhir dari serangkaian peristiwa penaklukan wacana, konflik politik, dan penghapusan pengetahuan bahasa lokal (subjugated knowledges) oleh struktur kekuasaan masa lalu. Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan untuk membongkar bagaimana wacana standarisasi bahasa (EYD) dikonstruksi oleh Majalah Tempo sebagai instrumen normalisasi Orde Baru. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam keilmuan Ilmu Komunikasi bahwa bahasa dan aturan ejaan huruf bukan sekadar alat netral untuk mengirimkan pesan, melainkan sebuah teknologi politik yang sangat kental untuk mengontrol pikiran dan kesadaran massa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada bagian latar belakang, peneliti berfokus untuk menjawab rumusan masalah yaitu “bagaimana Genealogi penciptaan Ejaan Yang Disempurnakan di konstruksi oleh Majalah Tempo dari awal penciptaan hingga menjadi hal yang normal di tengah masyarakat”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ditemui, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penggunaan teks dan wacana genealogi Ejaan Yang Disempurnakan dalam Majalah Tempo 1972 - 1988
2. Mengungkap kepentingan pemerintahan orde baru dalam Genealogi Ejaan Yang Disempurnakan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan

mengenai kajian Ilmu Komunikasi, terkhusus komunikasi massa dan analisis wacana kritis agar dapat dikembangkan lebih lanjut dan mendalam pada penelitian berikutnya. Harapan peneliti dapat menambah pengetahuan dan pembuka ruang diskusi mengenai Genealogi, ideologi media, dan relasi kuasa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi pembaca bahwa wacana yang keluar dari media merupakan hasil dari konstruksi berdasarkan ideologi yang dimiliki media penyebarannya. Terakhir adanya harapan peneliti dapat menjadi referensi bagi pembahasan topik Genealogi, Ideologi Media, dan Resistensi terhadap kekuasaan.

